

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Alzwar, M., Samodra, H., dan Tarigan, J. J. ., *Pengantar Dasar Ilmu Gunungapi*, Nova, Bandung, 1987.
- Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, makalah tidak dipublikasikan.
- Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Dari Perspektif UUD*, makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995.
- Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1995.
- Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, No.3, Vol. 14, *Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran*, Bandung, 1996.
- Dinas Pengairan, Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA), *Laporan Awal Kegiatan Pemetaan Rawan Bencana : Peta Resiko Gunung API Merapi*, Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Djulianto Susantio, *Memaksimalkan Potensi Pariwisata di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, disertasi, Universitas, Padjajaran, Bandung, 1996.
- Nurwigati, *Peningkatan Peranan Peraturan Perizinan sebagai Instrumen Pemerintah*, diskusi akademik dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam B. Arief Sidharta (Editor). *Butir-butir Gagasan*

tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Philipus M. Hadjon (penyunting), *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Prins dan Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1993.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan, Unair, Surabaya, 1995.

Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan*, makalah pada Seminar Lingkungan Hidup, Jakarta.

Sjachran Basah, *Perizinan di Indonesia*, makalah untuk Penataran Hukum Adminitrasi dan Lingkungan, Unair, Surabaya, 1992.

Soedikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, BPUD, Semarang, 1991.

Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.

Spelt dan ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.

Perundang-Undangan :

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman.

WEBSITE

<http://jogja.tribunnews.com/2017/12/05/the-lost-world-castle-tetap-akan-buka>.
Diakses tanggal 2 Maret 2019, pukul 19.30 WIB.

JURNAL

Ivan, Fauzani, Raharja dan Ratna, Dewi. (2013). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal penelitian* Vol. 15, No. 2,

Arliandy, Pratama., Arief, Laila, N., Arwan, Putra W. (2014) Pemodelan Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Api Berbasis Data Penginderaan Jauh (Studi Kasus Di Gunung Api Merapi). *Jurnal geodesi undip* Vol.3, No. 4.

Amelia, M, K, Panambunan. (2016). Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Lex administratum* Vol. IV, No. 2.

Dadan, Mukhsin, ST., MT. (2015). Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung(Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Perencanaan wilayah dan kota* Vol. 14, NO. 1.

Nur, Aisyah. (2017). Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak. *Jurnal Samudra keadilan* Vol. 12, No. 1.

Dahlia, Kusuma, Dewi., Alvi, Syahrin., Syamsul, Arifin., Pendastaren, Tarigan. (2014). Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan

Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). *USU law journal*. Vol. II, No. 1.

Wicito, Setiadi. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6, No. 4.

I, Gusti, Ayu, Ketut, Rachmi, Handayani. (2010). Peranan sanksi administrasi dalam penegakan hokum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 5, No. 1.

Ivan, Fauzani, Raharja dan Ratna, Dewi. (2013). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Jurnal penelitian* Vol. 15, No. 2.

Nur, Aisyah. (2017). Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak. *Jurnal samudra keadilan* Vol. 12, No. 1.